



REKENING PNS GENDUT

AWAL Desember ini, pemberitaan media diramaikan dengan sejumlah dugaan rekening PNS gendut. Ini bukan tentang rekening bank para PNS yang berbadan gendut. Melainkan tentang sejumlah PNS yang disinyalir memiliki rekening berjumlah besar, berjumlah milyaran rupiah. PPAK menemukan sejumlah aliran dana yang mencurigakan pada sejumlah PNS bergolongan rendah dan masih muda.

Beberapa bulan sebelumnya, pemberitaan serupa juga gencar diberitakan oleh media. Hanya pelakunya diduga dilakukan oleh sejumlah petinggi Polri. Hingga kini tidak ada pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut. Kasusnya seolah menguap. Dugaan rekening PNS gendut pun sepertinya bakal menguap, tergerus oleh sejumlah berita heboh lainnya.

PNS dengan skala gaji yang telah terukur, sebetulnya kekayaannya juga terukur. Bagaimana mungkin PNS muda yang bergaji (plus berbagai penghasilan tambahan lainnya) yang berkisar 5 juta rupiah memiliki rekening milyaran, memiliki properti mewah, dan membagi-bagikan uang ke sejumlah rekening keluarganya? Dengan sangat mudah, orang bisa menengarai kalau orang seperti Gayus Tambunan memiliki hal-hal tersebut karena korupsi.

Permasalahannya, tak mudah untuk membuktikannya. Bukan karena orang-orang seperti Gayus Tambunan, PNS muda itu, lihai dalam menyembunyikan hasil korupsinya tetapi seringkali kasusnya saling "menyandera".

Saya tidak yakin orang korupsi dilakukan seorang diri. Itu bukan korupsi tetapi mencuri. Korupsi tampaknya dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara ramai-ramai sehingga kalau ada yang tertangkap, cukup satu orang yang dikorbankan dan melindungi lainnya.

Lemahnya penegakan hukum dan ringannya hukuman tindak pidana korupsi, kerap kali dijadikan dasar asumsi mengapa korupsi masih terus berlangsung. Ada seloroh yang mengatakan orang mau-mau saja korupsi karena jika tertangkap dan telah menjalani hukuman sekitar satu tahun, setelah itu masih bisa menikmati hasil korupsinya. Bandingkan dengan PNS yang baik-baik itu harus menutup hutangnya dengan gajinya yang tak seberapa itu.

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hidup sebagai mantan koruptor. Kekayaannya

yang tidak tersita itu masih bisa menghidupinya. Orang-orang masih respek dan tak ada aspek penghinaan atas "karir"-nya sebagai koruptor. Bandingkan dengan nasib para mantan atau orang-orang yang tersangkut G.30.S/1965/PKI. Mereka tak bisa bekerja di sektor pemerintahan. Hak-hak politiknya dicabut. Bahkan anak-anaknya pun susah mencari pekerjaan. Label eks-tapol cukup menyengsarakan orang-orang yang terlibat G.30.S/1965/PKI, juga keturunannya.

Dari kasus sejarah ini, saya bayangkan hal semacam itu diberlakukan pada para koruptor. Mereka itu pada intinya tidak bakal takut melewati sepenggal hidupnya di penjara. Yang mereka takutkan adalah kemiskinan. Orang-orang korup sebagian besar ingin memperkaya diri. Oleh karena itu, jika semua hartanya disita, dibuat miskin, tampaknya akan lebih membuatnya jera. Juga anak-anak dan suami/istrinya dibuat miskin dengan menerapkan seperti apa yang dialami anak-anak eks-tapol itu.

Maaf, itu hanya angan-angan saya. Memang dosa seseorang tidak bisa dilanjutkan pada anak-anaknya. Bagaimana mungkin seseorang melakukan tindak korupsi, keluarganya juga dikenai hukuman? Tetapi, siapa tahu malah efektif untuk pencegahan tindak korupsi.

Di Jerman pada Perang Dunia II, Hitlerlah yang memerintahkan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi yang dikenal dengan istilah *holocaust*. Begitulah sejarah menuliskannya. Meski pelakunya Hitler dan pasukan Nazi, hingga kini warga Jerman harus menanggung kompensasi terhadap negara Israel dan menanggung dosa-dosa Hitler. Mereka tetap dianggap sebagai "pelaku" kejahatan genosida itu. Labelisasi terhadap sikap anti-semit seolah-olah menjadi stereotip negatif bagi mereka. Begitulah inti buku *Holocaust Industry* karya Norman G. Finkelstein (2000).

Apakah kita juga perlu membenci pelaku tindak korupsi dan juga keturunannya? Apakah kita juga tidak bakal bisa berkelit dari sebuah sistem yang cenderung korup? Atau malah punya hasrat terpendam untuk melakukan korupsi demi anak cucu?

Dr. NURHADI, M.Hum.
Pemimpin Redaksi